BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

RINGKASA EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2024 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi 4 (Empat) Program Belanja Non Pelayanan dasar. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Capaian rata-rata seluruh kinerja kegiatan yang mendukung sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja mendapat skor antara 80% - 90% **(Kategori cukup berhasil)**.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LKIP ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan, oleh karenanya kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara di masa yang akan datang.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di bidang Perberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63,92
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.00
			Indeks Desa Mandiri (IDM)	Desa Maju 10, Berkembang 125, tertingal 184

Gunungtua, 17 maret 2025
Kepala Dinas Pembedayaan
Masyarakat dan Desa

Yusuf MD Hasibuan,MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19770914 199703 1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya tujuan jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu : "***Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa***"

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Kami berusaha dan berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah – kaidah yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,nanum kami menyadari belum dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan semua masukan serta saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan yang akan dating.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024.Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan,khususnya bagi para pimpinan unit kerja lingkungan Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan kwalitas pelayanan.

Gunungtua, 17 maret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Yusuf MD Hasibuan,MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19770914 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Ringkasa Eksekutif		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Penjelasan Umum Organisasi	3
	1.3 Permasalahan Utama	10
	1.4 Dasar Hukum	12
	1.5 Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	15
	2.2 Rencana Kinerja	20
	2.3 Perjanjian Kinera Tahun 2024	37
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	43
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	43
	3.2 Realisasi Anggaran	71
BAB IV	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jumlah SDM menurut klasifikasi kepangkatan 7

1.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 8

1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 9

2.1 Indikator Kinerja Utama 17

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun2024 sd 2026 ... 19

3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 45

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 46

3.1.2 Membandingkan Aantara Realisasi Kinerja Capaian Tahun 2024 Tahun 2023 dan 2022 dan 2021 48

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun 2024 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi 58

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 59

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan 60

3.1.6 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber daya 62

3.1.7 Analisi Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 63

3.1.8 Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2024..... 65

3.1.9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71

3.10 Realisasi Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024..... 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Gambar AKIP..... 67
1.1. Gambar Pelayanan Publik.....68
1.2. Gambar Indeks Desa Membangun.....73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKJIP menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib membuat perencanaan program kegiatan yang strategis, sinergi, terukur, dan tepat sasaran serta untuk melaksanakannya memperoleh anggaran dari APBD. Anggaran dimaksud wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi tingkat capaian kinerjanya serta menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi. Dalam rangka melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja dimaksud dan juga sebagai pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan menyajikan keberhasilan dan atau kegagalan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2024

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Mendorong Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Struktur Organisasi,Uraian Tugas Fokok dan Fungsi,dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuoaten Padang Lawas Utara disebutkan Bahwa:

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaaan Masyarakat Dan Desa"

Untuk menyelenggarakan tugasdan Fungsi sebagaimana dimaksud, dalam ayatp pasal 3 pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki fungsi :

a merumuskan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

b pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang bina pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;

d. merumuskan kebijakan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah pelaksanaan tugas Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa;

e pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang bina

pemerintahan desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, meliputi :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris Dinas membawahi :
    1. Subbag Umum
        - Pengelola
        - Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
    2. Subbag Keuangan
        - Bendahara
    3. Fungsional Perencana
c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa membawahi
    1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi :

1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

e. Bidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya membawahi :

1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

f. Bidang Pemerintahan Desa membawahi :

1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
4. Fungsional Pelaksana Analis Institusi Masyarakat Perdesaan

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

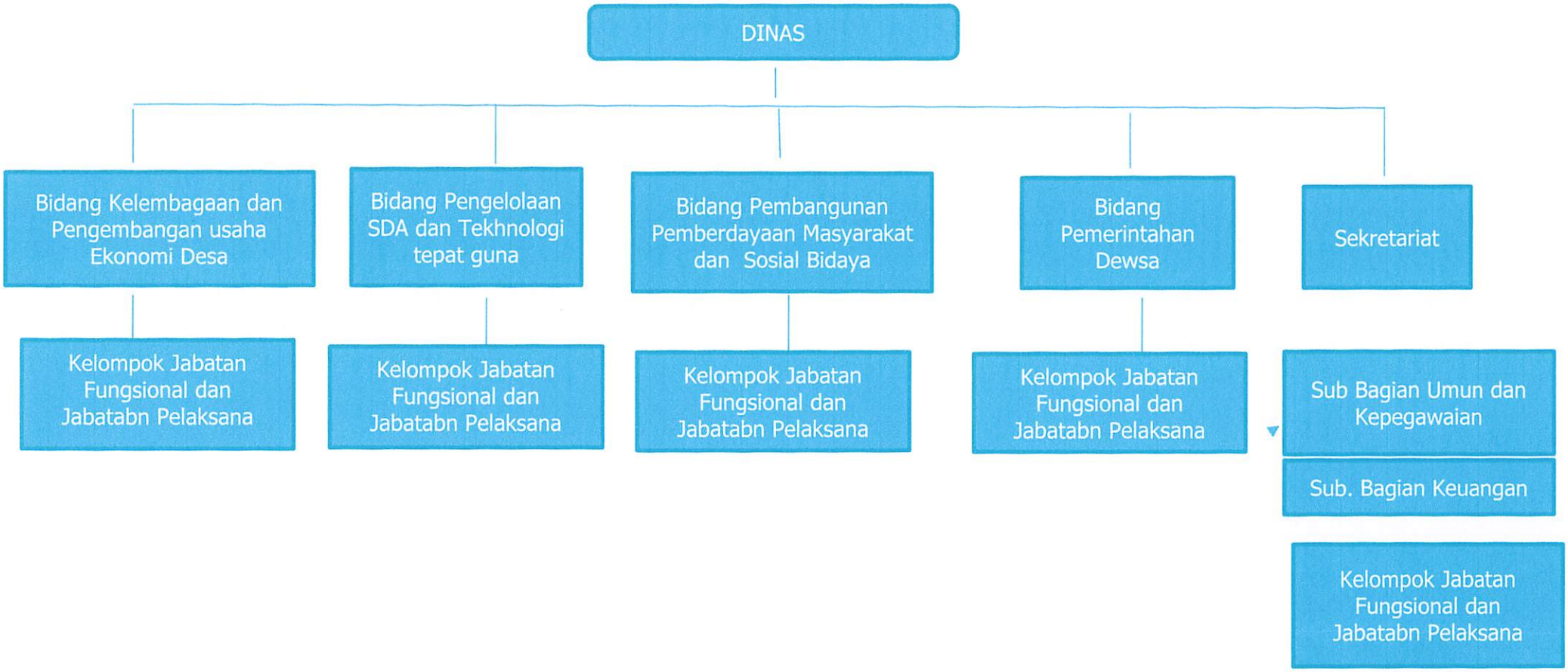

1.2.3 JUMLAH PEGAWAI

Adapun jumlah Aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara per Desember 2024 sebanyak 23 orang PNS dan 29 (dua puluh sembilan) orang tenaga harian lepas (THL). Lebih jelasnya dapat lihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah SDM menurut klasifikasi kepangkatan

No	Jabatan	PNS Golongan				Non PNS
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1				
2.	Sekretaris	1				
3.	Kasubbag Umum		1			
4.	Kasubbag Keuangan		1			
5.	Perencana		1			
6.	Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	1				
7.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
8.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
9.	Kabid Pemanfaatan SDA dan TTG	1				
10.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
11.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
12.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
13.	Kabid Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan Sosial Budaya		1			
14.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			

15.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
16.	Kabid Pemerintahan Desa		1			
17.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
18.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
19.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat		1			
20.	Fungsional Analis Institusi Masyarakat Perdesaan		1			
21.	Fungsional Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		1			
22.	Fungsional Pengelola		1			
23.	Bendahara			1		
24.	Tenaga Harian Lepas (THL)					29
	Jumlah	4	18	1	-	29

Sumber Data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Magister (S2)	5	
2	Sarjana (S1)	17	
3	Diploma III	2	
4	Diploma II	0	
5	Diploma I	0	
6	SLTA	1	
Jumlah		**23**	

Sumber Data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian

TABEL 1.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Jabatan PimpinanTinggi	1	
2	Jabatan Administrator	5	
3	Jabatan Pengawas/Fungsional	9	
4	Jabatan Pelaksana	6	
5	Struktural	1	
Jumlah		**23**	

Sumber Data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Aspek strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Hal ini disebabkan analisis aspek strategis merupakan salah satu dasar perumusan misi pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan pertanggungjawaban terhadap prioritas pembangunan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dalam jangka panjang. Pada Tahun ini dampak yang dirasakan masa transisi, sebagaimana diketahui bersama saat ini Kabupaten Padang Lawas Utara menghadai musim politik. Sehingga pengaruh penurunan anggaran dalam pelaksanaan Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum mengalami kebijakan pergeseran anggaran OPD terhadap Pemilihan Umum serentak. Hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak tercapainya target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap berkomitmen untuk merealisasikan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renstra sampai dengan tahun terakhir. Langkah-langkah prepentif yang dilaksanakan adalah dengan melakukan kajian dan analisis.

Isu strategis /Permasalaham yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

1. Kurang optimalnya pengelolan lembaga ekonomi perdesaan terutama BUMDes atau BUMDesma;
2. Kurangnya efektivitas dan kapabilitas aparatur di dalam pemerintahan desa;
3. Kurangnya peran aktif lembaga masyarakat desa dan lembaga adat desa;
4. Belum Optimalnya Database Profil Desa
5. Kurangnya daya dukung pemerintah dalam peningkatan kualitas desa berkembang, desa maju dan desa mandiri;

6. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna dalam mendukung perekonomian masyarakat desa
7. Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan standar pelayanan
8. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

9. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna dalam mendukung perekonomian masyarakat desa
10. Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan standar pelayanan
11. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan

1.4 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional;

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rencana Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengaah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

8 Peraturan Bupati Padng Lawas Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi jabaran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta susunan organisasi. Meliputi alasan penyusunan LKJIP ini untuk mewujudkan kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sistematika Penyusunan di dalam Bab I Pendahuluan, sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang
1.2 Penjelasan Umum Organisasi
1.3 Permasalahan Utama
1.4 Dasar Hukum
1.5 Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana anggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun sistematika penyusunan di dalam Bab II Perencanaan Kinerja, sebagai berikut :

1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1.4 Rencana Kinerja

1.5 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja, serta diuraikan juga realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Adapun penyajian di dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja, sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAR DAN DESA

Untuk melaksanakan program pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai arah kebijakan pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 .Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawa utara Penyusunan LKJIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara 2005-2025 yang ditetapkan B u p a t i dan Wakil Bupati menjadi acuan utama dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara berbunyi :

" Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang Maju dan Sejahtera Berbasis Agro Industri"

Sebagai unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut adanya peningkatan kinerja dan kualitas aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan terciptanya tata keperintahan yang baik.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan OPD yang ikut bertanggungjawab untuk bisa mencapai tujuan Nomor 1 yaitu ***"Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Bersih"***

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Padang Lawas Utara dalam kurun waktu tiga tahun (2024 sd 2026) adalah sebagai berikut : ***"Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa"***.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masayakatat dan Desa pada tahun 2024-2026, sebagai berikut : ***"Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa".***

Adapun Indikator Sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Nilai Akip Perangkat Daerah
b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
c. Indeks Desa Membangun (IDM)

A. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan RPD Tahun 2024 sd 202026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Indikator Kinerja Utama. Berikut ini Tabel 2.1 yang berisi tentang IKU Dinas Pemberdayaan dan Desa tahun 2024 sd 2026.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sd 2026

<table>
<tr><th>No</th><th>Tujuan</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama (IKU)</th><th>Defenisi Operasional</th><th>Formulasi</th><th colspan="3">TARGET</th><th>Sumber Data</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td colspan="3">7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di bidang Perberdayaan Masyarakat dan Desa</td><td>Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</td><td>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah</td><td>Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub- Komponen</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>Sub-Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub-Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan</th></tr>
<tr><td></td><td>20%</td><td>30%</td><td>50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr>
</table>
</td><td>63,92</td><td>68,92</td><td>73,92</td><td>Sekretariat</td></tr>
</table>

			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat /pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat	**IKM= Total dari Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang** **Total Unsur yang terisi**	78.00	80.00	82.00	Sekretariat
			3. Indeks Desa Membangun (IDM)	Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun	Hasil Penilaian dari kementrian desa	Desa Maju 10, Berkembang 125, tertinggal 184	Desa Maju 15, Berkembang 150, tertinggal 174	Desa Maju 20, Berkembang 125, tertinggal 162	Tim Ahli

Sumber data : RPD 2024-2026

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024 sd 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5		
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di bidang Perberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa	Nilai Akip Perangkat Daerah	63,92	68,92	73,92
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.00	80.00	82,00
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa Maju 10, Berkembang 125, tertinggal 184	Desa Maju 15, Berkembang 150, tertinggal 174	Desa Maju 20, Berkembang 125, tertinggal 162

Sumber data : RPD 2024- 2026

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
c. Meningkatkan Peran Aktif Perempuan Pedesaan
d. Pembentukan Posyantek(Pos Pelayanan Tekhnologi Tepat Guna)
e. Menyujudkan Penyelenggraan Pemerintahan Desa
f. Meningkatkan Tertif Administrasi manajemen Pemerintahan Desa

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana pemangku kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan Visi Renstra. Arah Kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Pembentukan Bumdes Bersama
c. Kelompok Binaan PKK
d. Lahirnya inovasi – inovasi alat Tekhnologi tepat guna
e. Melaksanakan Pemutahiran atau Update data pfofil Desa yang akurat
f. Meningkatkan Jumlah desa yang berorestasi

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RTP (Rencana Pembangunan Daerah) dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Oleh karena itu dalam RENJA ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yag diperlukan secara optimal. sehingga tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seseuai dengan ***Perubahan Rencana Kerja*** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara alokasi anggaran adalah sebesar **Rp.7.823.207.953 ,-**

Berikut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta pagu Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarskat dan Desa Kab. Padang Lawas Utara TA. 2024 dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2024	PBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.166.543.870,00	7.952.648.461,00	7.823.207.953,00	-343.335.917,00							8.513.213.991,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.166.543.870,00	7.952.648.461,00	7.823.207.953,00	-343.335.917,00							8.513.213.991,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.166.543.870,00	7.952.648.461,00	7.823.207.953,00	-343.335.917,00							8.513.213.991,00	

1,	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 persen**	**100 persen**	**5.986.542.670,00**	**5.937.907.261,00**	**5.508.468.253,00**	**346.670.121,00**							**6.333.212.791,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*				1 dokumen	1 dokumen	2.154.000,00	2.154.000,00	2.194.800,00	40.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		2.154.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.154.000,00	2.154.000,00	2.194.800,00	40.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.154.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen kegiatan administrasi keuangan daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	5.296.752.670,00	5.331.968.661,00	4.886.776.453,00	-409.976.217,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		5.603.327.191,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	5.139.672.670,00	5.174.888.661,00	4.863.976.453,00	-275.696.217,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.446.247.191,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	157.080.000,00	157.080.000,00	22.800.000,00	-134.280.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			157.080.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				7 dokumen	7 dokumen	321.206.000,00	260.466.000,00	251.328.400,00	-69.877.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		361.301.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	3.116.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.116.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.283.100,00	38.283.100,00	38.283.100,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			78.378.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.788.100,00	7.788.100,00	7.788.100,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			7.788.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.270.800,00	17.270.800,00	17.270.800,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			17.270.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.630.000,00	18.630.000,00	18.630.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			18.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.930.000,00	30.930.000,00	30.930.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	205.188.000,00	144.448.000,00	135.310.400,00	-69.877.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			205.188.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	280.920.000,00	257.808.600,00	285.858.600,00	4.938.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		280.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.920.000,00	58.920.000,00	86.970.000,00	28.050.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			58.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	216.000.000,00	192.888.600,00	192.888.600,00	-23.111.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				2 Laporan	2 Laporan	85.510.000,00	85.510.000,00	82.310.000,00	-3.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		85.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajek dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	78.190.000,00	78.190.000,00	74.990.000,00	-3.200.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			78.190.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			7.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**							**60.000.000,00**	

	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa**				**100 persen**	**100 persen**	**60.001.200,00**	**60.001.200,00**	**310.000.000,00**	**0,00**							**60.001.200,00**	

	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	60.001.200,00	60.001.200,00	310.000.000,00	249.998.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		60.001.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0 Orang	600,00	600,00	0,00	-600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																	

			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	600,00	600,00	0,00	-600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	310.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Banyaknya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.060.000.000,00**	**1.894.740.000,00**	**1.944.739.700,00**	**0,00**							**2.060.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.060.000.000,00	1.894.740.000,00	1.944.739.700,00	-115.260.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		2.060.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				386 Lembaga	386 Lembaga	2.000.000.000,00	1.834.740.000,00	1.884.740.000,00	-115.260.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	59.999.700,00	-300,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	JUMLAH								**8.166.543.870,00**	**7.952.648.461,00**	**7.823.207.953,00**	**-343.335.917,00**							**8.513.213.991,00**	

Sumber data : SIPD RI Kemendagri Cetak Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi Pencegahan Korupsi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Percepatan Untuk Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel. Namun demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu penyusunan Perjanjiaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPD Tahun 2024- 2026, RENJA Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pewmberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**	**SEBELUM**	**SESUDAH**
1	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	63,92	63,92
			2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.00	78.00
			3. Indeks Desa Membangun (IDM)	3. Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa Maju 10, Berkembang 125, Teringgal 184	Desa Maju 41, Berkembang 183, Teringgal 14

NO	PROGRAM		ANGGARAN		KETERANGAN	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.986.542.670	Rp 5.508.468.253	APBD	P-APBD
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	APBD	P-APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 60.001.200	Rp 60.000.000	APBD	P-APBD

4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 2.060.000.000	Rp 2.060.000.000	APBD	P-APBD
	JUMLAH		**Rp. 8.166.543.870**	**Rp7.688.468.253**	**APBD**	**P-APBD**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2024 berasal dari APBD dan Dau eamark Kab Padang Lawas Utara.

Sesuai dengan DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Lawas Utara Jumlah Anggaran sebesar sebesar **Rp.7.823.207.953 ,-** dengan rincian belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 6.758.661.294,- terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Rp. 4.886.776.453,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp.2.936.431.500,-

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis, maupun program pendukung. Berikut ini Tabel Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2024

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**5.508.468.253**
Perencanaan,Penganggaran ,dannevaluasi Kinerja Perangkat Dearah	**2.194.800**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.194.800
-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.886.776.453**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.863.976.453
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**251.328.400**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.116.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.283.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.788.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.270.800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.630.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.930.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.310.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**285.858.600**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.970.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.888.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**82.310.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.990.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.320.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**60.000.000**
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	**60.000.000**
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	60.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**310.000.000**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	**310.000.000**
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	310.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**1.944.739.700**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.944.739.700**
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.884.740.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	59.999.700
J U M L A H....	**7.823.207.953**

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas Keuanagn Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di dalam tahun anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan untuk mencapai 4 (sasaran) strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RTP) yang telah ditampung di dalam APBD Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 7.649.976.894 atau sebesar 97,79 %. Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat disajikan berdasarkan sasaran berikut ini :

Target Sasaran berdasarkan Indikator
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola yang Baik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63,92
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,00
			Indeks Desa Mambangun (IDM)	Desa Maju 10, Berkembang 125,Tertinggal 184

Sumber data : RPD 2024- 2026

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Pemberdayaan

Masayarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2024. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{\% capaian kinerja} = \frac{\text{\% Realisasi capaian Kinerja}}{\text{\% Target Capaian Kinerja}} \times 100\ \%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja

sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	>91	Sangat Tinggi	
2	76 > 90	Tinggi	
3	66 > 75	Sedang	
4	51 > 65	Rendah	
5	**< 50**	**Sangat Rendah**	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.1.1
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63,92	64,15	100,32	Sekretariat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.00	84,65	108,52	Sekretariat
		Indeks Desa Mandiri (IDM)	Desa Maju 10, Berkembang 125, tertingal 184			Bidang Sosial Budaya

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2024

1,1,2,Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022

Tabel 3.1.2
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022 dan 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMU;ASI	TARGET				Perangkat daerah
					2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7		
TUJUAN 1 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Demokratif, Bersih dan Berkualitas	SASARAN 1 : Terwujudnya Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	IKU 1 : Lomba Desa	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Prestasi keikutsertaan pada lomba desa tingkat Provinsi	-	Juara Harapan III	Jauara Harapan II	-	Bidang Pemerintahan Desa
		IKU 2 : Badan Permusyawaratan desa (BPD)_	Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.	Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aktif	386 BPD 160 Desa Swakarya	386 BPD 170 Desa Swakarya	386 BPD 190 Desa Swakarya	-	Bidang Pemerintahjan Desa Bidang Pemerintahan Desa

	SASARAN 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa yang berkualitas	IKU 3 : Profil Desa	Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.		160 Desa Swakarya	170 Desa Swakarya	190 Desa Swakarya	-	Bidang Pemerintahan Desa
		IKU 4 : Indeks Desa Mandiri	PermendesaPDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM)		105 Desa Berkembang	115 Desa Berkembang	130 Desa Berkembang	Desa Maju 10, Berkembang 125, tertinggal 184	Bidang Sosbus
		IKU 5 : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDesa) Aktif	386 LPM Desa	386 LPM Desa	386 LPM Desa	-	Bidang Kelembagaan
	SASARAN 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	IKU 6 :Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	PermendesaPDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang terbentuk	50 Bumdes	25 Bumdes	25 Bumdes	-	Bidang Kelembagaan
		IKU 7 : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)	PermendesaPDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa	-	10 Posyantekdes	10 Posyantekdes	-	Bidang TTG

			Pengelolaan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Desa.	(Posyantek des) yang terbentuk.					
	TUJUAN 2 : Meningkatkan lembaga ekoomi desa dan peran aktif perempuan pedesaan	IKU 8 : Desa Binaan	Permendagri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah.	Prestasi keikutsertaan pada Desa Binaan PKK dan PTP2WKSS tingkat Provinsi	Juara di 2 Kategori	Juara di 3 Kategori	Juara di 3 Kategori	-	Bidang Kelembagaan
		IKU 9 : Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan pedesaan		Jumlah Kelompok Usaha ekonomi perempuan pedesaan	-	5 Kelompok	5 Kelom[pok	-	Bidang Kelembagaan
IKU 2024-2026									
TUJUAN 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di bidang Perberdayaan Masyarakat dan Desa TUJUAN 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di bidang	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan	IKU 1 : Nilai AKIP Perangkat Deerah	Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku	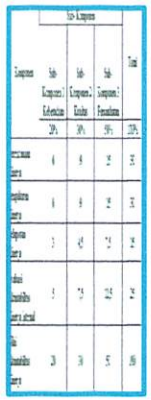	-	-	-	63,92	TIM EVALUATOR

Perberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa		kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.						
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat / pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitaslayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	IKM= Total dari Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi	-	-	-	78.00	Sekretariat

		IKU 3 : Indeks Desa Membangun (IDM)	Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun	Hasil Penilaian dari Kementrian Desa	-	-		Desa Maju 10, Berkembang 125, tertingal 184	Bidang Sosbud

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi pada 4 (empat) sasaran strategis selama tahun 2023, sebagai berikut :

Lomba Desa

Lomba desa pada tahun 2023 tidak mendapat prestasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara, sehingga realisasinya masih kosong, sedangkan target yang diharapkan belum memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Profil Desa

Profil Desa tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun Desa tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya 98 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 namun realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 namun realisasinya masih kosong, belum memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Pelayanan Teknolgi Tepat Guna

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna pada tahun 2023 terlaksana, sehingga realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Desa Binaan

Desa Binaan pada tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2023 realisasinya masih 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan pada tahun 2023 terlaksana, realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

(LKJIP) 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Lomba Desa

Lomba desa pada tahun 2022 lalu tidak mendapat prestasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara, sehingga realisasinya masih kosong, begitu juga untuk tahun 2023 tidak terlaksana, sehingga realisasinya masih tetap kosong.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa tahun 2022 dan tahun 2023 terlaksana, realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa dengan berstutus 386 BPD aktif

Profil Desa

Profil Desa tahun 2022 dan tahun 2023 terlaksana, pada tahun 2022 realisasinya Kosong, namun untuk tahun 2023 realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun Desa tahun 2022 realisasinya kosong, namun pada tahun 2023 realisasinya 98 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa dengan jumlah desa berkembang 127 desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 dan tahun 2023 terlaksana realisasinya 100 %, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 terlaksana, dengan 2 Bumdes yang telah berdiri, namun pada tahun 2023 realisasinya kembali kosong, memberikan dampak yang menurun terhadap perkembangan Bumdes.

Pelayanan Teknolgi Tepat Guna

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna pada tahun 2022 terlaksana dengan realisasi sedangkan realisasi tahun 2023 mencapai 10 Posyantekdes, hal ini berdampak positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Desa Binaan

Perbandingan realisasi Desa Binaan pada tahun 2022 dengan tahun 2023, pada tahun 2022 realisasinya 4 Kategori, sedangkan tahun 2023 realisasinya hanya 3 Kategori, namun tetap memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Pedesaan pada tahun 2022 realisasinya 2 kelompok, sedangkan tahun 2023 realisasinya 3 kelompok, memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan masyaraket desa.

1,1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.1.3
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Target Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63,92	73,92	115,64
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,00	82,00	105,12
		Indesks Desa Membangun (i	Deasa Maju 10,Berkembang 125,Tertinggal 184	Desa Maju 20, Berkembang 125, tertingal 162	

1.1.4 Membandingkan realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4
Membandingkan realisasi Kinerja tahun 2023
dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63,92		102.22
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,00		108.41
		Indeks Desa Membangaun (IDM)	Desa Maju 10,Berkembang 125,Tertinggal 184		

1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan Penurunan KinerjaSerta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan Penurunan KinerjaSerta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63,92	64,15	100,32	Berhasil	Melaksanakan evaluasi AKIP secara berkala Mengumpulkan data kinerja yang relevan dan mendukung Menggunakan teknologi informasi untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja Melakukan pemantauan kinerja secara berjenjang Memastikan pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan Merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas Memberikan solusi atas masalah yang ditemukan

		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.00	84,65	108,52	Berhasil	Menarik minat OPD untuk berpartisipasi dalam survei Menugaskan sekretariat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SKM Melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan OPD Memublikasikan rencana dan tindak lanjut hasil SKM kepada masyarakat Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Mendorong penyelenggara pelayanan untuk menjadi lebih inovatif
		Indeks Desa Mandiri (IDM)	Desa Maju 10,Berkembang 125,Tertinggal 184	Desa Maju 41,Berkembang 182,Tertinggal 114	65,6		

1.1.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Efesiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63,92	64,15	100.32	2.194.800	2.162.200	98,51	
		Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM)	78,00	84,65	108.52				
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa Maju 10,Berkembang 125,Tertinggal 184	Desa Maju 41,Berkembang 182,Tertinggal 1114	65,6	60.000.000	59.640.000	99,40	-

1.1.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang	Analisis
1	Meningkatkan Tata Kelola yang baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	**100,32**	**Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota**	**98,51**	**Menunjang**	Pelayanan sudah diupayakan semaksimal mungkin
1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	108,50	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ atau barang		Menunjang	Peningkatan Nilai belum dikatakan berhasil sepenuhnya salah satu penyebabnya adalah kurangnya SDM kompeten di bidang

		Indeks Desa Mandiri (IDM)		Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kerjasama Antar Desa	65,6	Menunjang	Kurangnya sarana prasara menjadi kendala tersendiri bagi dinas pemberdaya an Masyarakat dan Desa dan SDM yang minim. Pelaksanaan sub kegiatan ini hanya bisa melakukan Sosialisasi saja

3.1.8 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS :

"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa"

Realisasi Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakatvdan Deas Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.8
Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Lawas Utara
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	63.92	64,15	100,32
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,00	84,65	108,52
		Indeks Desa Mambangun (IDM)	Desa Maju 10, Berkembang 125, tertingal 184	Desa Maju 41, Berkembang 182, tertingal 114	65,6

Untuk mencapai Sasaran Strategis ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di BIdang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*** ada tiga (3) indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

1. ***Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)***

Berikut ini realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah) yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakatvdan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara

Pada Tahun 2024 Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah) adalah 64,15 % dari target 63,92 % atau

dengan Capaian 100,32% atau masuk dalam kategori ***Sangat Tinggi***.

- ***Faktor Pendukung***

  Faktor pendukung pada indikator ini antara lain :

  1. SDM
  2. SOP
  3. Tupoksi

  Untuk mencapai indicator Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Lawas Utara melaksanakan **1 kegiatan yaitu :** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan yaitu :

  1. *(Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

  Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

  1. Mencapai Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa
  2. Memuat Kebijakan,Program,dan Kegiatan Pembangunan yang di lakasanakan dalan jangka waktu tertentu

- ***Permasalahan***

Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini antara lain :

1. Belum optimalnya Pelayanan
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang melayani
3. Belum memadainya kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM Perhubungan dalam memberikan pelayanan

- ***Solusi***

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah :

1. Meningkatkan sarana prasarana di bidang Pemberdayaan Masayarakat dan desa
2. Melakukan Segala Sesuatau Berdasarkan SOP
3. Melakukan pembinaan kepada SDM

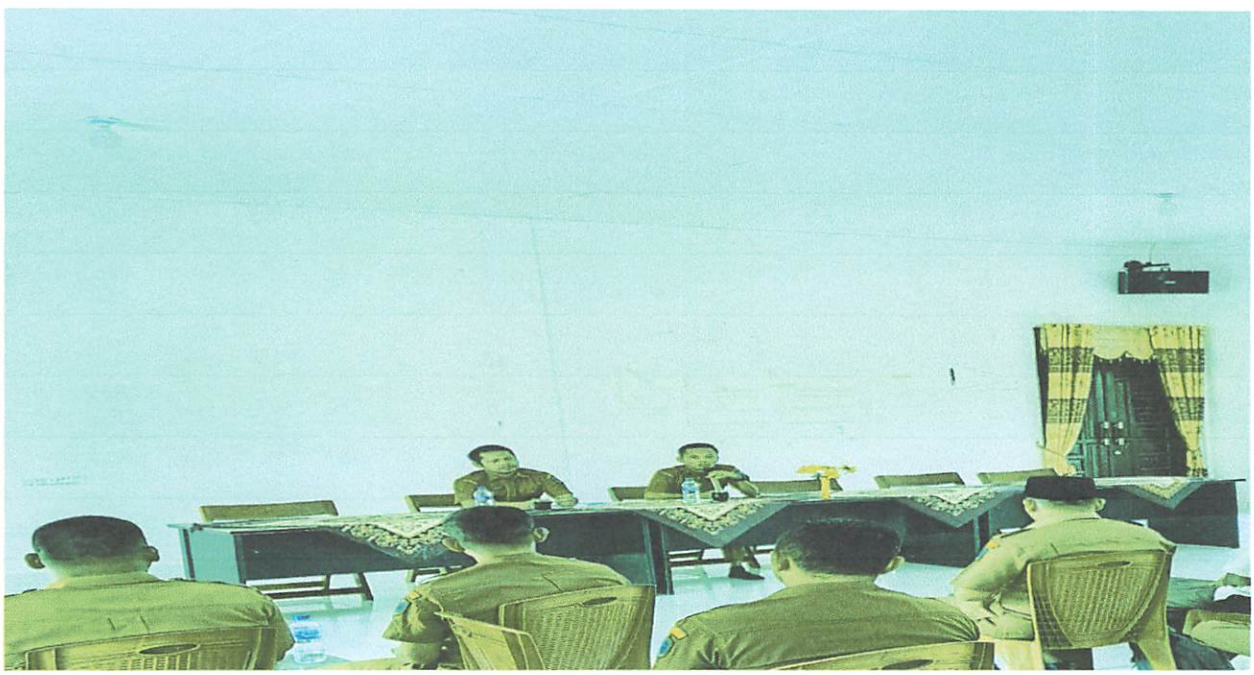

Sumber : SKM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) bagi aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 yang berguna untuk meningkatkan kompetensi ,Pengetahuan,dan Keterampilan ASN

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2024 adalah capaian yang diperoleh 84,65 % dari target % atau dengan Capaian 100% atau masuk dalam kategori **Sangat Tinggi.**

- **HAMBATAN**

Faktor pendukung indicator ini antara lain :

1. Kualitas Pelauanan Publik Yang Baik

Yang menjadi factor pendukung tercapainya indikator ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*** Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan **Kegiatan Perencanaan.Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Permasalahan yang dihadapi pada indicator ini adalah sebagai berikut ***KURANGNYA KESADARAN RESPONDEN TERHADAP PENTINGNYA SURVEI IKM***

- **UPAYA PERBAIKAN**

Solusi/ upaya yang dapat dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapai indikator ini yaitu :

1. Memilah kebutuhan yang lebih penting sehingga pada akhirnya kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan tersebut dapat terpenuhi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melakaukan Survey kepuasan Masyarakat melalui link yangvsudah di sediakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat ,Adapun sasaran dari survey tersebut adalah perangkat Desa ,Aparatur desa dan Masyarakat,layanan yang di berkan oleh Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa anatar lain:

1. pelayanan Aparatur Desa Terhadap Pemerintahan Desa
2. Verifikasi Berkas Permohonan Dana Desa ADD,BHP,BHR

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,41	3,34	3,39	3,58	3,32	3,30	3,33	3,33	3,44

Kategori	**B**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

Sumber data : SKM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

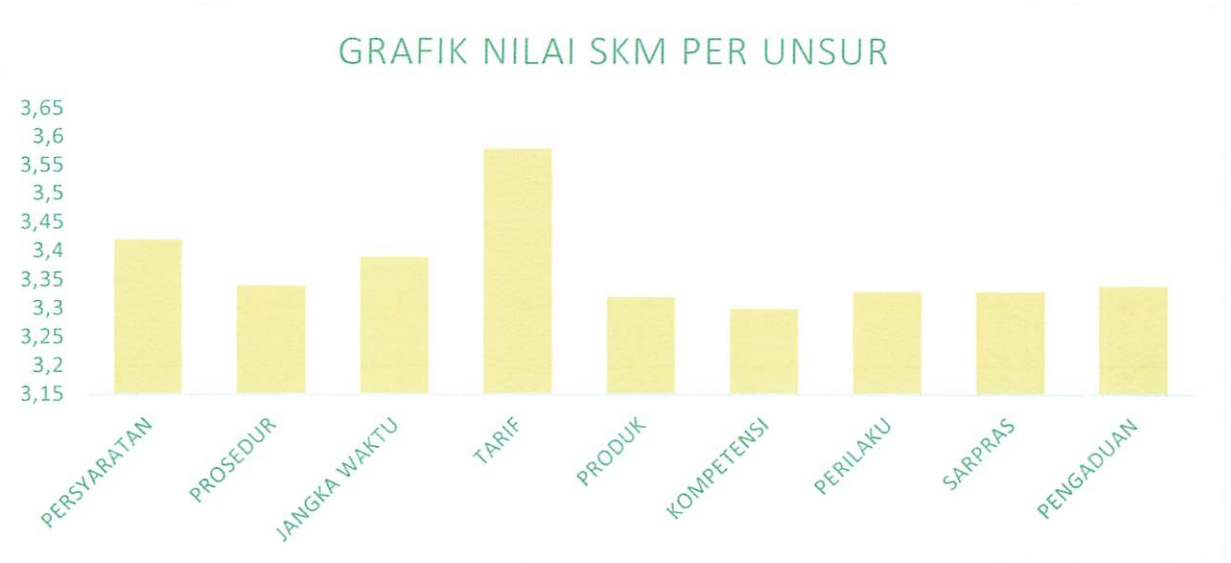

Sumber data : SKM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Sumber : SKM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Sumber : SKM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Gambar Pelayanan Publik

3. *Indeks Desa Mandiri*

Padang Lawas Utara Memiliki 386 Desa 2 kelurahan , Indeks Desa Membangun (IDM) hadir Sebagai Indikator Tunggal yang Komprehensif untuk mengukur tingkat perkembangan desa – desa Indonesia. IDM Menjadi alat Vital bagi Pemerintah ousat dan daerah dalam merencanakan,melaksanakan,serta mengevaluasi program pembangunan desa secara tepat sasaran.

Realiasi indikator kinerja ini tak bisa di laksanakan olaeh Dinas Sendiri aklan tetapi adanya kerejasama oleh Tim AHLI yang akan Menilai :

Realisasi Pada tahun 2024 Adalah desa Maju 41 Desa , Desa Berkembang 182 Desa dan Tertinggal 114 Desa.

- **Faktor Pendukung**

adalahKerangka Kerja Pembangunan bverkelanjutan yang melibatkan aspek social,Ekonomi dan ekologi

Permasalahan yang dihadapi pada indicator ini adalah sebagai berikut :

1. Data Rusak ,Unduhan Macat

- **Solusi**

Solusi/ upaya yang dapat dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencapai indikator ini yaitu : membuat aplikasi yang yang berbasis online

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Lintas Gununtua -Langga Payung Km 3,5 komplek Gedung Serba Guna
GUNUNGTUA - 22753

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli Tahun 2024 bertempat di :

1. Kabupaten : PADANG LAWAS UTARA
2. Provinsi : SUMATERA UTARA

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024 dengan hasil sebagai terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Disahkan Team Verifikasi

Plt. KEPALA BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Lawas Utara	KEPALA DPMD Kabupaten Padang Lawas Utara	KOORDINATOR TENAGA AHLI Kabupaten Padang Lawas Utara
(HAHOLONGAN SIREGAR, SE, MM)	(YUSUF M.D HASIBUAN, MAP)	(ANDI ARMAN PILIANG, ST)
PEMBINA UTAMA MUDA	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	
NIP. 19690815 199803 1 004	NIP. 19770914 199703 1 001	

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012001	MANAHAN	0,48	0,3833	0,6667	0,51	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012002	PASANG LELA	0,5543	0,3833	0,6	0,5125	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012003	AEK JABUT	0,6057	0,4333	0,6667	0,5686	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012004	NABUNDONG	0,6457	0,3667	0,7333	0,5819	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012005	GUNUNG SORMIN	0,5257	0,3167	0,6667	0,503	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012006	SIHALO HALO	0,6114	0,4167	0,5333	0,5205	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012007	KUALA SIMPANG	0,7771	0,6	0,7333	0,7035	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012008	SIMUNDOL	0,6514	0,4	0,8667	0,6394	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012009	NAHULA JULU	0,4286	0,3	0,6667	0,4651	SANGAT TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012010	SIMANINGGIR SIMUNDOL	0,4114	0,3667	0,6667	0,4816	SANGAT TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012011	SIMANGAMBAT	0,7086	0,4667	0,6	0,5917	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012012	SABA BANGUN	0,5943	0,45	0,5333	0,5259	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012013	MALINO	0,5714	0,3833	0,6	0,5183	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122001	DOLOK SIGOMPULON	1220012014	GONTING BANGE	0,4229	0,3	0,6667	0,4632	SANGAT TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122001	HUTA RAJA	0,7943	0,5833	0,5333	0,637	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122002	UJUNG BATU JULU	0,6743	0,5167	0,6667	0,6192	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122003	GUNUNG MANAON UB	0,6914	0,4167	0,6	0,5694	TERTINGGAL
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122004	LABUHAN JURUNG	0,7429	0,45	0,6667	0,6198	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122005	MARTUJUAN	0,7771	0,4333	0,6667	0,6257	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122006	PAYA BAHUNG UB	0,6686	0,4667	0,6667	0,6006	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122007	TOBING TINGGI UB	0,7257	0,5667	0,5333	0,6086	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122008	UJUNG BATU JAE	0,7086	0,4333	0,6667	0,6029	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122009	MARLAUNG	0,7143	0,4333	0,6667	0,6048	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122010	MANANTI	0,8	0,45	0,6	0,6167	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122011	JAMBU TONANG	0,7771	0,65	0,4667	0,6313	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122012	MANARE TUA	0,7943	0,4667	0,8	0,687	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	122012	UJUNG BATU	1220122013	PASIR LANCAT UB	0,5771	0,4667	0,5333	0,5257	TERTINGGAL

Disahkan Team Verifikasi

Plt. KEPALA BAPELITBANGDA	KEPALA DPMD	Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara
(HAHOLONGAN SIREGAR, SE, MM)	(YUSUF MD HASIBUAN, MAP)	(ANDI ARMAN PILIANG, ST)
PEMBINA UTAMA MUDA	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	
NIP. 19690815 199803 1 004	NIP. 19770914 199703 1 001	

Sumber : IDM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Mufakat Masyarakat Desa (Musdes) Keterbukaan Informasi Masayarakat Mendapatkan Informasi yang jelas danterbuka mengenai Rencana Kebijakan desa.

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Sumber : IDM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Sumber : IDM Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara secara ringkas adalah sebagai berikut :

TABEL 3.9
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.508.468.253	5.350.834.994		157.633.259
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.194.800	2.162.200	-	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.194.800	2.162.200	98,51	32.600
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.886.776.453	4.750.095.379	197	4.863.976.356
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.863.976.453	4.727.295.379	97,19	4.863.976.356
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.800.000	22.800.000	100,00	22.799.900
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.328.400	248.731.955	693	2.596.445
	- Penyedia Komponen Instalasi Listril/Penerangan Bangunan Kantor	3.116.000	3.116.000	100,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.283.100	36.739.200	95,97	1.543.900
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.788.100	7.718.000	99,10	70.100
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.270.800	17.030.000	98,61	240.800
	- Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	18.630.000	18.609.600	99,89	20.400
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.930.000	30.800.000	99,58	130.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.310.400	134.719.155	99,56	591.245
	Penyediaan Jasa Penunjang		**267.827.271**	**279**	**18.031.329**

	Urusan Pemerintahan Daerah	**285.858.600**			
	- Penydiaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00	-
	- Penyediaan Jasa Komunikasi ,SumberDaya Air dan Listrik	86.970.000	68.938.671	79,27	18.031.329
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.888.600	192.888.600	100,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.310.000	82.018.189	199	291.811
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	74.990.000	74.758.189	99,69	231.811
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.320.000	7.260.000	99,18	60.000
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	60.000.000	59.640.000,00		360.000
	Fasilitasi kerjasama antar desa	60.000.000	59.640.000,00		360.000
	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	60.000.000	59.640.000	99,40	360.000
	Program administrasi Pemerintahan desa	310.000.000	303.697.700	-	6.302.300
	Pembinaan dan Pengawasan administrasi Pemerintahan desa	310.000.000	303.697.700		6.302.300
	Pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	310.000.000	303.697.700	97,97	6.302.300
	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembga adat dan masyarakat hukum adat	**1.944.739.700**	**1.935.804.200**		**8.935.500**
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatn yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarkat hukum adat yang masyarakat pelaku hukum adat yang sama dalam daerah kab kota	**1.884.740.000**	**1.876.062.300**		8.935.500
	Peningkatan kapasitas kelembaa kemasyarakatan desa/kelurahan(RT/RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.884.740.000	1.876.062.300	99,54	8.677.700
	Fasilitasi Pemerintahan deas dalam pemanfaatan tekhnologi tepat guna	59.999.700	59.741.900	99,57	257.800
	JUMLAH	**7.823.207.953,00**	**7.649.976.894,00**	**99,57**	**173.231.059,00**

TABEL 3.10
REALISASI ANGGGARAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Tata Kelola yang baik dan Bersih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/ Kota**	**2.194.800**	**2.162.200**	**98,51**	**32.600**	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah)	73,92	64,15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.194.800.	2.162.200	98,51	32.600	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	84,65					-	

		Indekjs Desa Membangun (IDM)	Desa Maju 10,Berkembang 125,Tertinggal 184	Desa Maju 41,Berkembang 182,Tertinggal 114	Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	**60.000.000**	**59.640.000**	**99,40**	**360.000**	
					Fasilitasi Kerj Antar Desa	60.000.000	59.640.000	99.40	360.000	

Dari table tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dirinci per program kegiatan adalah sebesar Rp.7.823.207.953dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.649.976.884 atau 99,57 %

Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis hanya Sebagian kecil dari totoal keseluaran anggan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa realisasi keuangan tahun 2024 sebesar 99,57%. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Prioritas 4 kegiatan dimana realisasi anggaran sebesar Rp.7.823.207.953 dengan total anggaran Rp.7.649.976.894 atau dengan persentase 99.57%

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan bentuk laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaanan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan dikenal berkualitas baik dalam pembinaan desa. Selama tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami keterbatasan dalam hal pencapaian kinerja, capaian yang didapat pada tahun ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan koordinasi serta inovasi dari semua pihak untuk mewujudkan sasaran–sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun ada yang pencapaiannya dibawah 25%. Meskipun sebagian besar capaian indikator telah memenuhi bahkan melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di samping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daearah (RTP) Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara 2024-2026

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilaksanakan dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada. Disamping itu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik yang melekat pada tugas pokok dan fungsi juga tetap diupayakan pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku walaupun tanpa dukungan anggaran yang memadai;
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta diupayakan untuk dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan secara maksimal. Penetapan sasaran strategis tetap mengacu pada visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam RTPDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024- 2026 ;
3. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Perlunya terus meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik.
4. Perlunya terus mengevaluasi kinerja dan anggaran yang telah

dilaksanakan untuk memudahkan dalam menyusun kinerja dan anggaran yang efisien dan efektif.

5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ASN.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Gunungtua, 17 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

YUSUF MD. HASIBUAN, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19770914 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF MD HASIBUAN, MAP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RESKI BASYAH HARAHAP, S.STP., M.Si.**

Jabatan : **BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungtua, 10 Maret 2025

Pihak kedua,	Pihak pertama,
BUPATI PADANG LAWAS UTARA	**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**
RESKI BASYAH HARAHAP	**YUSUF MD HASIBUAN, MAP**
	PEMBINA UTAMA (IV/c)
	NIP. 19770914 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik dan Bersih di bidang Pemberdayaan Masyarak dan Desa	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,92
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00
		3. Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa Maju 15, Berkembang 150, tertingal 174

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.002.498.254	APBD
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa.	Rp. 60.000.000	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 60.014,600	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp. 1.333.999.900	APBD
Jumlah		**Rp. 7.468.267.554**	**APBD**

Gunungtua, 10 Maret 2025

Pihak kedua,

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

RESKI BASYAH HARAHAP

Pihak pertama,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

YUSUF MD HASIBUAN, MAP
PEMBINA UTAMA (IV/c)
NIP. 19770914 199703 1 001